

ABSTRACT

This research was conducted to describe and analyze the planning, implementation, and accountability system of accountability in Jrebeng Wetan village, Kedopok District, Probolinggo City in 2019. This research is descriptive qualitative. The results showed that the budget planning stage of the Kelurahan Jrebeng Wetan has not fully implemented the principle of participation, whose accountability is evidenced by the presence of a list of attendance at the Kelurahan Musrenbang. The implementation stage in the Jrebeng Wetan sub-district has implemented the principle of transparency as evidenced by installing an information board that provides a schedule for the implementation of ongoing physical activities. However, the construction has not been optimal, as evidenced by one of the activities that was not implemented. The accountability stage is technically good, according to the Mayor's Regulation and Permendagri, but there are still low levels of human resources in the level of understanding of financial administration management, resulting in delays in submitting accountability reports.

Keywords : Urban Village Budget, Planning, Implementation, Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban di kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo pada Tahun 2019. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perencanaan anggaran kelurahan di kelurahan jrebeng wetan belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipasi yang akuntabilitasnya dibuktikan dengan adanya daftar hadir musrenbang kelurahan, hasil dari musyawarah yang dilaporkan pertanggungjawabannya. Tahap pelaksanaan di kelurahan jrebeng wetan telah menerapkan prinsip transparansi dibuktikan dengan memasang papan informasi yang memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dijalankan. Namun dalam pembangunannya belum optimal terbukti dari salah satu program kegiatan yang tidak terlaksanakan. Tahap pertanggungjawaban secara teknis sudah baik, sesuai Peraturan Walikota dan Permendagri namun masih rendahnya SDM dalam tingkat pemahaman pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Anggaran Kelurahan, Perencanaan, Pelaksanaan,
Pertanggungjawaban